

DAFTAR PUSTAKA

- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko,2003, *Membangun Good Governance Di Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Bambang, Sancoko. 2008. *Kajian Terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia*. Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI
- Bastian, Indra. 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Budi, Setiono. 2005, *Jaring Birokrasi: Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*. Jakarta: Gugus Press.
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Edisi IV. Yogyakarta: BPF. Republik Indonesia. 1999. *Intruksi Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia
- Republik Indonesia.1999. *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1999.Sekretariat Negara.Jakarta
- Republik Indonesia.1999. *Undang-Undang no. 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Lembaga Negara RI tahun 1999. Sekretariat Negara.Jakarta
- Republik Indonesia.2003. *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003. Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kepala Lembaga Administrasi Negara
- Republik Indonesia.2003. *undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003.Sekretariat Negara.Jakarta

Republik Indonesia.2004. *Undang- undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab keuangan negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2004.Sekretariat Negara.Jakarta

Republik Indonesia.2014. *PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.Lembaran Negara RI Tahun 1 999.Sekretariat Negara Jakarta



LAMPIRAN

A.1 Tabel 4.5: hasil pengukuran dari indikator efektifitas melalui data sasaran dan indikator kinerja